

Pengadilan Negeri Semarang
Kelas I A Khusus



Perjanjian Kinerja



(024) 7616384



pn.semarangkota@gmail.com



www.pn-semarangkota.com



Jalan Siliwangi Nomor 512
Semarang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Judi Prasetya, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

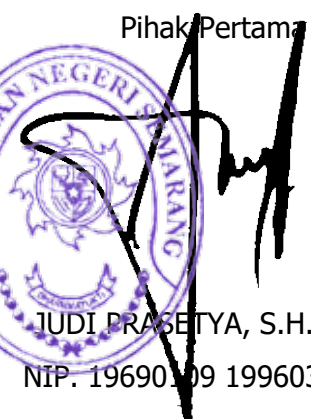
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 29 Agustus 2024

Pihak Kedua

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

Pihak Pertama

JUDI PRASETYA, S.H., M.H.
NIP. 19690109 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus
Tahun : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : -Perdata -Perdata Niaga -Perdata PHI -Pidana -Pidana Korupsi	95% 100% 90% 100% 100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	2%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	
		➤ Banding	90%
		➤ Kasasi	85%
		➤ PK	95%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu : -Perdata -Perdata Niaga -Perdata PHI -Pidana -Pidana Korupsi	100% 100% 90% 100% 90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) - Perdata - Perdata PHI	100% 100%
5.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparansi, efektif dan efisien	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti	100%
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	80%
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	80%
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	10%
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan parameter objektif	100%
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel efektif dan efisien	a. Persentase penyerapan anggaran :	
		✓ DIPA Badan Urusan Administrasi	99%
		✓ DIPA Badan Peradilan Umum	99%
		b. Persentase Temuan (Internal maupun eksternal) yang ditindaklanjuti	100%

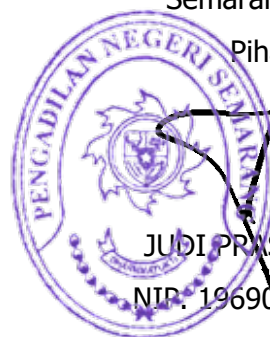
Kegiatan :

		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	30.874.158.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	514.200.000,00



Pihak Kedua

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H
NIP. 19580821 198403 1 001



Semarang, 23 Juli 2024

Pihak Pertama

JUDI PRASETYA, S.H., M.H.
NIP. 19690109 199603 1 002